

ABSTRAK

Implementasi pemberian nafkah anak pasca perceraian yang tidak dilaksanakan secara optimal oleh para mantan suami akan menimbulkan polemik. Hal tersebut yang terjadi pada beberapa putusan nafkah anak salah satunya Putusan Perceraian Pengadilan Negeri Sragen Nomor 22/Pdt.G/2009/PN.Srg. Setelah putusan perceraian tersebut mantan suami tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah padahal pekerjaannya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mana mempunyai penghasilan tetap setiap bulan. Mantan istri kemudian mengajukan gugatan nafkah anak ke pengadilan atas nafkah anak dan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan putusan nafkah anak dari pengadilan. Kemudian juga melihat akibat hukum serta cara penyelesaian apabila terdapat pengabaian nafkah anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian adalah penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data primer berupa wawancara dengan informan kunci yaitu hakim dan advokat yang didapatkan langsung dari lapangan dan didukung dengan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian melalui studi kepustakaan. Dan metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan secara rinci hanya terkait kewajiban orang tua terhadap nafkah anak saja sedangkan mengenai nafkah anak mulai dari definisi, pelaksanaan hingga besaran nafkah belum secara jelas diatur dalam sejumlah regulasi. Karena tidak adanya atau kekosongan regulasi yang mengatur hal-hal tersebut, maka keluarlah putusan hakim yang menjadi dasar pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian sebagai dasar hukum yang pada implementasinya tidak dilaksanakan oleh mantan suami. Implikasi yang dirasakan lebih hanya bersifat hukum keperdataan saja seperti kehilangan hak asuh anak. Penyelesaiannya dari adanya kelalaian ini dapat diajukan ke pengadilan dengan cara gugatan nafkah baru atau apabila telah ada putusan yang *inkracht* dapat dilakukan eksekusi. Sanksi pidana juga dapat diberlakukan kepada orang tua berdasarkan pasal pelanggaran penelantaran anak.

Kata Kunci : Nafkah, Implementasi, Penyelesaian

ABSTRACT

Implementation of post-divorce child support that is not carried out optimally by ex-husbands will lead to polemics. This happened in several decision of child support, one of which is the Divorce Decision District Court Sragen Number 22/Pdt.G/2009/PN.Srg. After the divorce decision, the ex-husband never carried out his obligation to provide a living even though his job was a Civil Servant (PNS) who had a steady income every month. The ex-wife then filed a child support lawsuit to the court for the child's support and was granted by the Panel of Judges. These legal writing aims to find out the implementation of the child support decision from the court. Then also look at the legal consequences and how to resolve if there is neglect about child support.

The research method used in this research are empirical juridical with research specifications is descriptive analytical research. The method of data collection carried out by the author by examining primary data in the form of interviews with key informants such as judges and advocates obtained directly from the field and supported by secondary data related to research through literature study. And the data analysis method used is qualitative analysis.

The results of this study indicate that the detailed regulation is only related to the obligations of parents towards children's livelihoods, while regarding children's livelihoods, from definition, implementation to the amount of maintenance, it is not clearly regulated in a number of regulations. Due to the absence or vacuum of regulations governing these matters, the judge's decision was issued which became the basis for implementing post-divorce child support as a legal basis which was not implemented by the ex-husband. The perceived implication is more of a civil law nature, such as the loss of child custody. The settlement of this negligence can be submitted to the court by way of a new income claim or if there has been an inkracht decision, execution can be carried out. Criminal sanctions can also be applied to parents based on the article on the violation of child neglect.

Keywords: Livelihood, Implementation, Settlement